

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2006), *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2002). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma, Surya. (2010). *Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fermana, S. (2009). *Kebijakan Publik*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Hanapiah, Pipin. (2001). *Teknik Perumusan Aspirasi Masyarakat*. Bandung: Penerbit UNPAD.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Moehariono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Suwarma A. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sajogyo, & Sajogyo, Pudjiwati. (1991). *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan Jilid 1*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sajogyo, & Sajogyo, Pudjiwati. (2002). *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan Jilid 2*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

- Siagian, Sondang P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soegiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Uno, Hamzah B. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Wahidi, Roestanto. (2015). *Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola Infrastruktur Desa*. Bogor: Indodata Development Center.
- Widjaja, HAW. (2010). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa .
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

3. Jurnal

- Haris, Abdul. (2015). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa*. Perspektif. FISIP Universitas Sumatera Utara; 8 (1) hlm 400-410
- Jamaludin, Yanhar. (2016). *Pemberdayaan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa*. Wedana. FISIP Universitas Islam Sumatera Utara; 2 (1) hlm. 179-188
- Wiryan, dkk. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli*. (tanpa nama jurnal). Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar; (tanpa keterangan volume dan nomor) hlm. 119-132
- Sarjiato, Arja. (2000). *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Puslit Universitas Kristen Petra Surabaya; 2 (2) hlm. 138 – 150

4. Internet

- <https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/>
- <http://kartonmedia.blogspot.co.id/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html>
- http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/kab_bandung%20barat_17_2009.pdf
- <http://bandungbaratkab.go.id>